

STUDI FASE-FASE PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Hairun Jariah¹, Ahmad Sirri², Angga Alfiannur³

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: hairunjariah@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: sirriahmad93@gmail.com

³ Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: anggaalfiannur@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the evolution of quality assurance systems in higher education, mapping their development from conventional methods to more comprehensive and complex models. By understanding this evolution, institutions can adapt and implement efficient QA systems that can meet the evolving demands and expectations of students, businesses, and society.

In response to the shifting educational landscape and the increasing emphasis on accountability and quality, quality assurance (QA) systems in higher education have undergone significant modifications over time. This system is crucial for ensuring the implementation of high-quality educational programs and maintaining the standing and reputation of higher education institutions.

Keywords: *Quality assurance, higher education, evaluation, academic*

ABSTRAK

Menanggapi pergeseran lanskap pendidikan dan meningkatnya penekanan pada tanggung jawab dan kualitas, sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi telah mengalami modifikasi yang signifikan sepanjang waktu. Sistem ini sangat penting untuk menjamin pelaksanaan program pendidikan yang berkualitas tinggi dan menjaga kedudukan dan reputasi institusi pendidikan tinggi. Artikel ini mengkaji perkembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, memetakan perkembangannya dari metode konvensional ke model yang lebih menyeluruh dan kompleks. Institusi dapat beradaptasi dan menerapkan sistem penjaminan mutu yang efisien yang dapat memenuhi tuntutan dan harapan mahasiswa, bisnis, dan masyarakat yang terus berubah dengan memahami evolusi ini.

Kata Kunci: Penjaminan mutu, Pendidikan Tinggi, Evaluasi, akademik

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemampuan perguruan tinggi menghasilkan lulusan berkualitas secara tidak langsung akan meningkatkan daya saing bangsa dalam persaingan antar bangsa. Pemerintah

Indonesia sejak tahun 1986 telah memulai upaya pengembangan SDM dengan melakukan reformasi mendasar dalam bidang Pendidikan Tinggi melalui berbagai program, salah satunya penjaminan mutu (*quality assurance*).

Institusi pendidikan tinggi telah lama memahami betapa pentingnya menjaga kualitas program yang mereka sediakan. Namun, sifat dan tujuan dari sistem penjaminan mutu telah berubah seiring berjalannya waktu. Sebelumnya, penjaminan mutu terutama difokuskan pada prosedur dan sistem internal di dalam organisasi. Otonomi kelembagaan dan pengaturan mandiri menjadi sorotan. Metode ini menawarkan beberapa jaminan kualitas, tetapi tidak ada validasi eksternal atau perbandingan dengan standar yang diakui.

Sistem penjaminan mutu telah mengalami pergeseran paradigma baru-baru ini, didorong oleh globalisasi, peningkatan mobilitas mahasiswa dan profesional, dan meningkatnya permintaan akan akuntabilitas dan transparansi. Institusi sekarang diharapkan untuk menunjukkan dedikasi mereka terhadap kualitas dengan mengikuti standar dan tolok ukur yang diterima dan menerima sertifikasi eksternal. Pertumbuhan pendidikan tinggi, pembentukan peringkat internasional dan organisasi akreditasi, dan kebutuhan akan metode penjaminan mutu yang responsif terhadap berbagai kepentingan pemangku kepentingan telah berdampak pada evolusi sistem penjaminan mutu.

Artikel ini akan membahas pengaruh utama, kemajuan, dan konsekuensi untuk pengendalian mutu di pendidikan tinggi dengan menggali secara mendalam berbagai tahap evolusi. Selain itu juga membahas kecenderungan saat ini dan potensi perkembangan masa depan untuk sistem penjaminan mutu sambil menyoroti kesulitan dan peluang yang spesifik untuk setiap langkah. Institusi dapat melintasi lanskap penjaminan mutu yang rumit dan mengadopsi strategi yang sesuai dengan misi, nilai, dan kebutuhan pemangku kepentingan mereka dengan memahami pengembangan sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mengungkapkan fenomena melalui pengumpulan data pada kondisi objek yang alami dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang kehadirannya mutlak diperlukan. Dengan adanya review ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang topik yang dibahas

PEMBAHASAN

Tahap 1 - Lembaga Penjaminan Mutu Nasional dan Badan Akreditasi

Lembaga penjaminan mutu nasional dan badan akreditasi didirikan pada tahap awal pengembangan sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi. Pengembangan prosedur untuk menilai dan mengevaluasi kualitas institusi dan

program pendidikan tinggi dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika negara-negara ini pertama kali memasuki era ini. Untuk memberikan validasi eksternal dan pemantauan program pendidikan, organisasi penjaminan mutu nasional dan otoritas akreditasi didirikan. Organisasi-organisasi ini menciptakan standar dan kriteria yang telah ditentukan yang digunakan untuk mengevaluasi universitas. Akreditasi telah menjadi metode yang diterima secara luas bagi institusi untuk membuktikan dedikasi mereka terhadap keunggulan dan membangun kredibilitas.

Selama tahap ini, evaluasi tingkat program merupakan penekanan utama dari penjaminan mutu. Organisasi akreditasi menilai masing-masing program dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan, dengan melihat hal-hal seperti struktur kurikulum, kredensial fakultas, sumber daya yang tersedia, dan hasil pembelajaran. Strategi ini berusaha menjamin bahwa program-program tertentu telah memenuhi standar untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi. Selain itu, selama masa ekspansi yang cepat dalam pendidikan tinggi, organisasi penjaminan mutu nasional dan organisasi sertifikasi sangat penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Menjadi penting untuk menciptakan sistem yang dapat mengevaluasi dan membedakan kualitas penawaran seiring dengan bertambahnya institusi dan program. Institusi-institusi sekarang menggunakan akreditasi sebagai cara untuk menonjol dalam persaingan dan menunjukkan keunggulan mereka.

Tahap 2 - Kerangka Kerja Regional dan Perjanjian Saling Pengakuan

Pengembangan kerangka kerja regional dan perjanjian saling pengakuan terjadi selama tahap kedua pembentukan sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi. Sebagai tanggapan terhadap globalisasi pendidikan tinggi dan meningkatnya mobilitas mahasiswa dan profesional, periode ini ditandai dengan upaya untuk meningkatkan harmonisasi dan kompatibilitas praktik penjaminan mutu melintasi batas-batas internasional.

Tahap kedua ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan dan menginternasionalisasikan sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi. Peningkatan kolaborasi, mobilitas, dan pengakuan kualifikasi dimungkinkan oleh kerangka kerja regional dan perjanjian tentang pengakuan bersama, yang membangun fondasi untuk peningkatan lebih lanjut dalam prosedur penjaminan mutu.

Fase 3 - Sistem Penjaminan Mutu yang Holistik dan Terintegrasi

Tahap ini mengakui bahwa keunggulan pendidikan tinggi melampaui program dan institusi tertentu. Hal ini mencakup elemen-elemen seperti penelitian, tata kelola, layanan dukungan mahasiswa, keterlibatan masyarakat, dan keseluruhan

pengalaman mahasiswa. Institusi mulai menerapkan program penjaminan mutu menyeluruh yang memperhitungkan berbagai faktor ini dan mendukung pola pikir peningkatan yang konstan. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas adalah salah satu kekuatan utama di balik perubahan ini. Para pemangku kepentingan, termasuk siswa, bisnis, dan legislator, menginginkan konfirmasi bahwa institusi pendidikan melaksanakan tujuan pendidikan mereka dan menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang dibutuhkan. Komponen kunci dari sistem penjaminan mutu menjadi penekanan pada hasil dan pengalaman mahasiswa secara keseluruhan.

Selain itu, selama fase ini, sistem untuk perencanaan dan peningkatan institusi diintegrasikan dengan penjaminan mutu. Institusi mengadopsi budaya peningkatan berkelanjutan di mana data dan umpan balik digunakan untuk memandu keputusan dan memajukan praktik pedagogis. Institusi sekarang sering menilai program mereka, membuat perubahan, dan melacak hasil sebagai bagian dari proses penjaminan mutu yang berulang untuk memastikan peningkatan yang berkelanjutan. Fase ketiga adalah pembentukan organisasi dan lembaga yang berfokus pada evaluasi dan peningkatan kualitas di tingkat institusi dan penjaminan kualitas eksternal. Untuk mengevaluasi kualitas institusi secara keseluruhan, badan-badan ini melakukan penilaian dan audit mendalam yang melihat berbagai faktor, termasuk tata kelola, kepemimpinan, perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan hasil belajar mahasiswa. Tujuannya adalah untuk membangun budaya kualitas dan tanggung jawab sekaligus memberikan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas institusi.

Pengembangan organisasi penjaminan mutu nasional dan lembaga sertifikasi merupakan tonggak penting dalam evolusi sistem penjaminan mutu, terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ada. Hal ini membuka jalan untuk kemajuan di masa depan dalam prosedur penjaminan mutu dan menciptakan dasar untuk validasi eksternal dan akuntabilitas dalam pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas mereka, institusi mulai memahami nilai sertifikasi dan berusaha untuk menyesuaikan program-program mereka dengan standar yang ada. Hal ini dilakukan sebagai pengakuan atas karakter kualitas yang beragam dalam pendidikan tinggi. Sebagai hasil dari perubahan ini, metode penjaminan mutu terpadu diciptakan yang berfokus pada seluruh ekosistem pendidikan dan bukan hanya pada program atau institusi tertentu.

KESIMPULAN

Ketiga Fase menandakan perubahan menuju sistem penjaminan mutu yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang mempertimbangkan banyak aspek kualitas dan menekankan pada pengalaman mahasiswa, hasil, dan pengembangan berkelanjutan. Institusi mengadopsi kerangka kerja evaluasi yang menyeluruh,

menggabungkan perencanaan institusional dengan penjaminan mutu, dan mempromosikan pola pikir untuk terus melakukan perbaikan. Pendekatan yang lebih luas dan menyeluruh terhadap penjaminan mutu terlihat pada fase ketiga. Institusi dan organisasi penjaminan mutu mulai mengadopsi pandangan holistik tentang mutu yang mencakup berbagai bidang, seperti pengajaran dan pembelajaran, penelitian, tata kelola, layanan dukungan mahasiswa, dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mursidi, T. Joko Raharjo, and A. Yulianto, “Factual Model of Internal Quality Assurance System of Private Higher Education Institutions in Indonesia,” 2020
- Badan Penjaminan Mutu, *Metode Pengukuran Sasaran Mutu Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2019.
- B. Febriadi, “Internal Quality Audit Administration Information System In Badan Penjaminan Mutu (Case Study: Universitas Lancang Kuning),” 2019.
- Cheung, P. P. T., & Tsui, C. B. S. (2010). Quality Assurance for All. *Quality in Higher Education*, 16(2), 169–171.
- Haapakorpi, A. (2011). Quality Assurance Processes in Finnish Universities: Direct and Indirect Outcomes and Organisational Conditions. *Quality in Higher Education*, 17(1), 69–81.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
- Kementerian Riset, *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta, 2016
- Kis, Viktoria. *Quality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effects*, Thematic Review of Tertiary Education. OECD. Paris. 2024
- L. Sudianto and P. Simon, “Development application of a quality assurance management information system for Paulus Indonesia Christian University,” *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 1088, no. 1, p. 012042, Feb. 2021, doi: 10.1088/1757-899x/1088/1/012042.
- M. B. Legowo, B. Indiarto, and D. Prayitno, “Implementation of Scrum Work Framework in the Development of Quality Assurance Information System,” *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, vol. 9, no. 2, p. 125, Dec. 2019, doi: 10.17933/jppi.2019.090204.

- Mursalim. Paradigma Baru Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Dalam Perspektif Total Quality Management. *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 13 No. 2desember 2010
- T. Ryan, "Quality assurance in higher education: A review of literature," *Higher Learning Research Communications*, vol. 5, no. 4, Sep. 2011, doi: 10.18870/hlrc.v5i4.257.
- Vishal Malhotra, *Scrum Question Bank: Professional Scrum Master I (PSM I) and Professional Scrum Product Owner I (PSPO I) Certification*, vol. 1. Vishal Malhotra, 2020.